

PERKEMBANGAN DAN POLA PERTUMBUHAN EKONOMI
WILAYAH PANTAI BARAT DAN PANTAI TIMUR
SUMATERA UTARA

Karya Ilmiah

Oleh :

Mardiana, SE



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS EKONOMI
M E D A N
2 0 0 1**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmad dan hidayahNya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Karya ilmiah yang berjudul “Perkembangan dan Pola Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera Utara” mengkaji perkembangan pendapatan per kapita penduduk dan pertumbuhannya serta pola pertumbuhan sektor-sektor ekonomi.

Disadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan waktu, ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Selain itu diharapkan para pembaca mau secara ikhlas memberikan kritik dan saran untuk kesempurnaan penulisan karya ilmiah di kemudian hari.

Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan juga menjadi sumbangsih bagi masyarakat. Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu, atas segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT. Ammin.

Medan, September 2001

P e n u l i s

Mardiana, SE

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan	5
1.3 Ruang Lingkup Kajian	5
BAB II PEMBANGUNAN EKONOMI	6
2.1 Pengertian Pembangunan	6
2.2 Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Wilayah	8
2.3 Pertumbuhan Seimbang dan Tidak Seimbang	15
2.4 Perubahan Struktur Ekonomi	18
2.5 Pengembangan Potensi Ekonomi	21
BAB III PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI WILAYAH PANTAI BARAT DAN PANTAI TIMUR SUMATERA UTARA	27
3.1 Pertumbuhan Ekonomi	27
3.2 Perkembangan Ekonomi	29
BAB IV POLA PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PANTAI BARAT DAN PANTAI TIMUR SUMATERA UTARA	35
BAB V KESIMPULAN	41
DAFTAR KEPUSTAKAAN	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spirituil. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat. Tetapi untuk seluruh masyarakat serta harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan merupakan suatu proses yang terus menerus melalui suatu perencanaan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat di suatu wilayah dalam berbagai aspek. Salah satu sasaran prioritas pembangunan adalah meningkatkan kegiatan pembangunan pada daerah-daerah yang pembangunannya relatif tertinggal dengan daerah lainnya baik antar propinsi maupun antar daerah dalam propinsi.

Permasalahannya adalah pendekatan dan pola pertumbuhan yang dipakai oleh suatu wilayah dalam mengejar pertumbuhan ekonominya. Kajian yang dilakukan oleh para ahli ekonomi pendukung teori pertumbuhan lebih cenderung mengarah pada pemanfaatan sumberdaya alam yang ada dan mengusahakan distribusi dana pembangunan dan investasi pada sektor-sektor yang dominan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Perencanaan pembangunan wilayah sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan di wilayah tertentu melibatkan interaksi antara sumberdaya manusia, alam, fisik dan kelembagaan. Dengan perencanaan, kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat tersebut dapat diarahkan. Perencanaan pembangunan wilayah dianggap penting karena kegagalan pembangunan di suatu wilayah akan memberikan dampak negatif terhadap pembangunan secara keseluruhan.

Untuk mengejar pertumbuhan, kondisi optimal pemanfaatan investasi dan dana pembangunan akan sulit diperoleh karena tujuan optimalisasi dana-dana tersebut adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dan hal itu merupakan sesuatu yang sangat riskan apabila yang diinginkan adalah mencapai pemerataan sekaligus pertumbuhan yang tinggi dalam suatu perekonomian.

Tidak terlepas dari permasalahan tersebut, daerah-daerah di Indonesia, termasuk Sumatera Utara, menghadapi dilema dalam perekonomiannya. Dilema tersebut yaitu pemilihan alternatif dan prioritas yang diinginkan dalam pertumbuhan ekonomi. Apakah akan memilih pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi atau mengutamakan pemerataan pembagian pendapatan baik di kalangan masyarakat maupun antar wilayah melalui pemerataan pembangunan dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah. Pembangunan sektoral yang dilaksanakan secara menyeluruh ke pelosok tanah air sejauh mungkin dikaitkan dengan usaha pembangunan wilayah. Pembangunan tersebut menitikberatkan pada pencapaian sasaran-sasaran sub-sistem kemasyarakatan di wilayah secara teritorial dan spatial.

Pembangunan bidang ekonomi pada dasarnya banyak diwarnai oleh pendekatan sektoral, di mana perencanaan makro masih mengikuti sistem pencapaian target peningkatan produksi untuk masing-masing sektor yang bersangkutan. Dengan tercapainya target tersebut diharapkan di samping pendapatan per kapita setiap tahun dapat meningkat, juga akan mengakibatkan adanya transisi sektoral dari pertanian ke sektor industri atau lainnya.

Kenyataan umum yang dihadapi dalam pembangunan adalah kecenderungan memupuk pembangunan pada daerah-daerah yang mudah dicapai dan memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi sebagai akibatnya daerah-daerah yang jauh menjadi terpencil dan terkebelakang. Keadaan ini akan berakibat wilayah yang miskin atau yang belum berkembang akan tetap terkebelakang disebabkan kurangnya potensi yang mereka miliki.

Kondisi geografis wilayah Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau, sehingga untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif, wilayah tersebut dibagi atas daerah-daerah. Secara regional propinsi Sumatera Utara termasuk daerah di kawasan Barat Indonesia yang pembangunannya relatif maju dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain di luar pulau Jawa.

Wilayah pantai Barat propinsi Sumatera Utara terdiri dari satu kota dan empat kabupaten dengan luas sekitar 35,33 persen dari seluruh luas propinsi tetapi penduduknya hanya sekitar 18,34 persen dengan kepadatan rata-rata hanya 86,67 jiwa per km². Kondisi tersebut sangat berbeda dengan wilayah pantai Timur yang terdiri dari dua kota dan empat kabupaten memiliki luas sekitar

34,64 persen tetapi penduduknya mencapai 58,11 persen dari penduduk Sumatera Utara dengan kepadatan rata-rata 279,81 jiwa per km².

Dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) Sumatera Utara, wilayah pantai Barat hanya menyumbangkan sekitar 14,89 persen sedangkan wilayah pantai Timur menyumbangkan sekitar 67,08 persen. Demikian pula dengan PDRB per kapita rata-rata, di wilayah pantai Barat hanya sebesar Rp. 1.336.162 sedangkan di wilayah pantai Timur mencapai Rp 2.230.310.

Perbedaan pola pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tergambar dari adanya perbedaan dalam hal pendapatan dan prioritas pembangunan wilayah dengan wilayah lain terkadang merupakan masalah. Hal tersebut harus diatasi dengan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan antar wilayah, khususnya dalam mempercepat pembangunan wilayah.

Agar perkembangan daerah-daerah di wilayah pantai Barat dapat disejajarkan dengan daerah-daerah di wilayah pantai Timur, maka perlu adanya perencanaan yang baik dan diadakan penelaahan keadaan penduduk, sosial-ekonomi, potensi lokasi dan hambatan di wilayah tersebut. Potensi atas sektor-sektor tersebut dikembangkan dengan pendekatan lintas sektoral, untuk mengembangkan pembangunan wilayah menuju keseimbangan antar wilayah dan kesatuan nasional melalui peningkatan kemampuan daerah dalam pembangunan nasional.

1.2 Tujuan Penulisan

Secara terperinci, penulisan makalah ini bertujuan adalah untuk :

1. Menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah pantai barat dan pantai timur Sumatera Utara.
2. Mengidentifikasi pola pertumbuhan ekonomi wilayah pantai barat dan pantai timur Sumatera Utara.

1.3 Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian ini adalah : (1) masalah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, dan (2) pola pertumbuhan ekonomi di wilayah pantai barat dan pantai timur Sumatera Utara.

Dari sudut perolehan informasi yang dibutuhkan, maka ada dua pihak yang berkaitan dengan kajian ini, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara dan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara.

BAB II

PEMBANGUNAN EKONOMI

2.1 Pengertian Pembangunan

Todaro (1998) menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi.

Menurut Rostow (1961) pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih banyak output daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan : masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci di antara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang didorong oleh satu sektor atau lebih (Todaro, 1998).

Sukirno (1985) mengemukakan pendapatnya tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi mempunyai 3 sifat penting, proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dan kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Demikian pula dengan Todaro (1998) yang

menyatakan bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.

Pembangunan ekonomi baik secara nasional maupun wilayah tentu tidak akan lepas dari faktor-faktor penghambat seperti ketimpangan dan kemiskinan. Faktor ini merupakan hal yang selalu hidup dan berkembang di negara-negara yang memiliki kondisi ekonomi, sosial dan budaya yang statis serta keterkaitannya dengan sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang tidak berkembang.

Akhirnya dalam memahami pembangunan, pertanyaan-pertanyaan harus diarahkan pada apa yang terjadi dengan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakmerataan atau ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi dapat saja terjadi tanpa ada perubahan terhadap hal tersebut. Dalam mencari strategi pembangunan baru, dewasa ini terdapat kecenderungan untuk mengarahkannya kepada ketiga kriteria pembangunan ini (Hanafiah, 1982).

Chenery (1979) mengartikan pembangunan ekonomi sebagai perangkat yang saling berkaitan dalam struktur perekonomian yang diperlukan bagi terciptanya pertumbuhan yang terus menerus. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses perubahan struktur yang ditandai dengan peningkatan sumbangan sektor industri, manufaktur dan jasa-jasa dalam pembentukan PDB di satu pihak dan menurunnya pangsa (*share*) sektor pertanian dalam PDB di lain pihak (Arsyad, 1992).

Hal ini menunjukkan bahwa salah satu indikator berkembang tidaknya suatu perekonomian dilihat dari sektor industri dan jasa terhadap PDB, artinya sumbangan sektor jasa dan industri meningkat akan mengakibatkan perekonomian tersebut semakin tinggi.

Seperti pendapat di atas, Dugary (1982) juga menyatakan bahwa pada dasarnya pembangunan wilayah berkenaan dengan tingkat dan perubahan selama kurun waktu tertentu suatu rangkaian variabel seperti produksi, penduduk, angkatan kerja, rasio modal-tenaga dan imbalan bagi faktor (*faktor returns*).

Tujuan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam kebijaksanaan dan sasaran, strategis tidak dapat dirumuskan dengan menggunakan variabel sektoral tetapi dengan variabel kewilayahan. Perubahan pembangunan wilayah pada dasarnya mempunyai arti peningkatan nilai manfaat (*value added*) wilayah bagi masyarakat suatu wilayah tertentu maupun menampung lebih banyak peningkatan dengan tingkat kesejahteraan yang baik yakni dengan tersedianya sarana prasarana (Hall, 1989).

2.2 Pertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi Wilayah

Dalam berbagai hal banyak pihak yang mengatakan bahwa pembangunan sangat terkait dan tidak bisa lepas dari unsur perkembangan dan pertumbuhan. Anggapan ini tentunya sangat dilandasi oleh berbagai kenyataan bahwa kedua hal ini merupakan komponen dan syarat penting yang harus terdapat disuatu negara baik negara terbelakang, negara berkembang maupaun negara maju.

Dalam membicarakan teori pembangunan ekonomi, langkah yang harus dilakukan adalah dengan membuat perbedaan diantara pertumbuhan dan pembangunan. Dalam prosesnya, pembangunan hampir pasti sedikit banyak bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut Harrod-Domar bersifat sangat umum, biasanya hanya membicarakan dua macam keluaran dan sejumlah masukan yang terbatas. Dalam hal sederhana, grafik akan sangat membantu untuk memberikan pengertian, model pertumbuhan atau paling sedikit haruslah merupakan subyek yang siap untuk diukur dan diuji secara empiris (Todaro, 1998)

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran utama keberhasilan dari pembangunan yang dilaksanakan, dan hasil pertumbuhan ekonomi tersebut akan dapat pula dinikmati oleh masyarakat yang berada di lapisan atas hingga lapisan paling bawah, baik yang terjadi dengan sendirinya maupun dengan adanya campur tangan dari pemerintah.

Pertumbuhan harus berjalan secara berdampingan dan berencana, mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil-hasil pembangunan dengan lebih merata. Dengan demikian maka suatu wilayah yang miskin, tertinggal dan tidak produktif akan menjadi produktif, yang akhirnya akan mempercepat proses pertumbuhan itu sendiri.

Ananta (1993) menjelaskan pertumbuhan ekonomi biasanya disertai dengan adanya proses akselerasi. Pemberdayaan sumber daya dan dana untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dalam rangka melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi

tersebut dengan secara riil dari jangka waktu tahun ke tahun akan tergambar melalui besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau indeks harga konsumen secara berkala. Yaitu pertumbuhan yang positif akan menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif akan menunjukkan adanya penurunan.

Sedangkan menurut Kaldor (1957) pertumbuhan ekonomi yang terbaik, yakni pertumbuhan dengan tingkat optimum. Dalam hal ini harus diperhatikan komposisi kekuatan atau output yang dihasilkan. Dengan tanpa memandang pengorbanan generasi sekarang yang mungkin diperlukan untuk membuat pertumbuhan keluaran output totalnya lebih cepat (Jhingan, 1993).

Hicks (1967) menarik kesimpulan dari perbedaan yang umum terdapat dalam konteks perkembangan dan pertumbuhan. Pendapat tersebut diperjelas dengan mengatakan bahwa perkembangan ekonomi mengacu pada masalah negara-negara dengan kondisi ekonomi yang terbelakang, sedangkan pertumbuhan lebih mengacu pada masalah di negara-negara maju.

Selain itu, masalah negara terbelakang menyangkut pengembangan sumber-sumber yang tidak atau belum dipergunakan, kendati penggunaannya telah cukup dikenal, sedang negara maju terkait pada masalah pertumbuhannya, karena kebanyakan dari sumber mereka sudah diketahui dan dikembangkan sampai pada batas-batas tertentu.

Bonne (1979) berpendapat bahwa perkembangan memerlukan dan melibatkan semacam pengarahan dan pedoman dalam rangka menciptakan kekuatan-kekuatan bagi perluasan dan pemeliharaan.

Begitulah yang sebenarnya terjadi pada kebanyakan negara terbelakang, sedangkan ciri pertumbuhan spontan merupakan ciri perekonomian maju dengan kebebasan usaha.

Schumpeter mengemukakan perbedaan yang lebih tegas tentang perkembangan yang merupakan perubahan secara spontan dan terputus-terputus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk (Sukirno, 1985).

Pembedaan yang paling sederhana dibuat oleh Madisson (1970) yaitu di negara-negara maju kenaikan dalam tingkatan pendapatan biasanya disebut pertumbuhan ekonomi, sedangkan di negara miskin disebut perkembangan ekonomi.

Pertumbuhan dapat diukur dan bersifat objektif, merupakan gambaran perluasan tenaga-tenaga kerja, modal, volume perdagangan dan konsumsi. Perkembangan ekonomi dapat dipergunakan untuk menggambarkan faktor-faktor penentu yang mendasari pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan dalam teknik produksi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga. Perubahan tersebut dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Namun terlepas dari perbedaan yang tampak ini, beberapa ahli ekonomi menggunakan istilah tersebut sebagai sinonim. Baran (1980) berpendapat bahwa gagasan perkembangan dan pertumbuhan itu sendiri mengesankan suatu peralihan kepada sesuatu yang baru dari sesuatu yang lama.

Pada dasarnya pembangunan wilayah berhubungan dengan tingkat dan perubahan dalam kurun waktu tertentu. Suatu rangkaian variabel seperti produksi, produk, angkatan kerja, rasio modal-tenaga dan berbagai faktor dalam wilayah dibatasi secara jelas. Laju pertumbuhan dari daerah-daerah biasanya diukur menurut output atau tingkat pendapatan yang berbeda-beda.

Pertumbuhan wilayah adalah produk dari banyak sektor, sebagian bersifat intern dan sebagian lainnya bersifat ekstrem serta faktor sosial politik. Faktor-faktor yang berasal dari dalam wilayah itu sendiri meliputi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal. Salah satu penentu ekstern yang sering digunakan dan bersifat penting adalah tingkat permintaan dari wilayah-wilayah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh wilayah tersebut.

Sasmita (1983) menyimpulkan pola pertumbuhan ekonomi wilayah tidak sama dengan apa yang ditemukan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pada dasarnya disebabkan pada analisa pertumbuhan ekonomi wilayah yang lebih menekankan pengaruh perbedaan karakteristik space terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesamaannya yakni penekanannya pada unsur waktu yang merupakan faktor penting dalam analisa pertumbuhan ekonomi wilayah (Hadjisaroso, 1994).

Perbedaan lainnya dengan teori pertumbuhan nasional adalah teori pertumbuhan nasional faktor yang sangat diperhatikan adalah modal, lapangan pekerjaan, dan kemajuan teknologi yang bisa timbul dalam berbagai bentuk, sedangkan pada teori pertumbuhan ekonomi wilayah faktor yang mendapat perhatian utama adalah keuntungan

lokasi, aglomerisasi, migrasi, dan arus lalu lintas modal antar wilayah.

Esmara (1986) mengelompokkan teori pertumbuhan ekonomi wilayah atas 4, yaitu:

- (a) Kelompok pertama disebut sebagai *export base-models*. Dipelopori oleh North (1955) dan dikembangkan oleh Tiebout (1956), kelompok ini mendasarkan pandangan dari sudut teori lokasi, berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu region lebih banyak ditentukan oleh jenis keuntungan lokasi dan dapat dipergunakan oleh wilayah tersebut sebagai keuntungan ekspor. Pertumbuhan suatu wilayah akan ditentukan oleh eksplorasi dan eksploitasi yang bersifat alamiah. Pertumbuhan ekspor wilayah yang bersangkutan juga dipengaruhi oleh tingkat permintaan ekstern wilayah lain. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan ekspor akan mengakibatkan berkembangnya kegiatan-kegiatan penduduk setempat, perpindahan modal dan tenaga kerja, keuntungan eksternal dan pertumbuhan wilayah lebih lanjut. Dengan kata lain, bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan suatu region, strategi pembangunannya harus disesuaikan dengan keuntungan lokasi yang dimilikinya dan tidak harus sama dengan strategi pembangunan pada tingkat nasional.
- (b) Kelompok kedua lebih berorientasikan pada kerangka pemikiran Neo-Klasik. Dipelopori oleh Stein (1964) dan dikembangkan oleh Roman (1965) dan Siebert (1969). Kelompok ini mendasarkan analisisnya pada peralatan fungsi produksi. Dikatakan bahwa unsur-unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi wilayah

adalah tanah, tenaga kerja, dan modal. Dalam kelompok ini juga dibahas tentang pengaruh perpindahan penduduk (*migrasi*) dan lalu lintas modal terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam model ini terdapat hubungan antar tingkat pertumbuhan suatu negara dengan perbedaan kemakmuran wilayah (*regional disparity*) pada negara yang bersangkutan. Pada saat proses pembangunan baru dimulai (*negara sedang berkembang*) tingkat perbedaan kemakmuran antar wilayah cenderung akan tinggi (*divergence*), bila proses pembangunan telah berjalan dalam waktu yang lama (*sedang berkembang*) perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah cenderung menurun (*convergence*).

- (c) Kelompok ketiga, menggunakan jalur pemikiran Keynes yang disebut *cumulative-causative models*. Dipelopori oleh Myrdal (1975) dan dilanjutkan oleh Kaldor. Kelompok ini berpendapat peningkatan pemerataan pembangunan antar wilayah tidak hanya diserahkan pada kekuatan pasar (*market mechanism*). Perlu adanya campur tangan pemerintah dalam bentuk program-program pembangunan wilayah, terutama wilayah yang relatif masih terbelakang.
- (d) Kelompok keempat dinamakan *core-periphery models*. Dipelopori oleh Friedman (1966). Kelompok ini menekankan pada hubungan yang kuat dan saling mempengaruhi antara pembangunan kota (*Core*) dan desa (*Peripheral*). Menurut teori tersebut, gerak langkah pembangunan wilayah perkotaan akan lebih banyak ditentukan oleh keadaan desa-desa yang ada disekitarnya. Corak pembangunan wilayah pedesaan akan ditentukan oleh arah



pembangunan perkotaan. Dengan demikian aspek interaksi antar daerah (*spatial interaction*) akan lebih ditonjolkan.

2.3 Pertumbuhan Seimbang Dan Tidak Seimbang

Dalam hubungannya dengan pembangunan wilayah yang dimaksud dengan pertumbuhan seimbang adalah pembangunan yang dilaksanakan secara merata di berbagai wilayah, sehingga wilayah mempunyai tingkat pertumbuhan pembangunan yang sama. Dalam teori pertumbuhan seimbang adakalanya pembangunan seimbang dimaksudkan sebagai pembanguan berbagai jenis industri secara serentak sehingga berbagai industri saling mencipta pasar bagi satu sama lain. Tetapi adakalanya pertumbuhan seimbang itu dimaksudkan sebagai keseimbangan pertumbuhan di berbagai sektor, misalnya di antara sektor industri dengan sektor pertanian, sektor luar negeri dengan sektor dalam negeri dan diantara sektor produktif dengan sektor prasarana (Sukirno, 1985).

Pembangunan yang serentak di berbagai sektor akan menciptakan perluasan pasar. Nurkse, Rosenstein dan Rodan sependapat mengenai peranan perluasan pasar dalam mempertinggi efisiensi kegiatan suatu industri, di mana pasar merupakan ekonomi ekstern untuk berbagai industri. Ekonomi ekstern yang diciptakan oleh perluasan pasar menyebabkan perbedaan yang besar sekali di antara produktivitas batas modal untuk suatu sektor dan untuk keseluruhan masyarakat dan perekonomian. Hal ini karena dorongan atau peransang untuk sesuatu perusahaan untuk mengadakan penanaman modal sering kali tidak cukup besar karena terbatasnya pasar. Tetapi jika ditinjau dari segi industri secara

keseluruhan, maka peransang tersebut sangat besar sekali, karena apabila sejumlah besar industri dikembangkan maka secara serentak setiap industri mengalami perluasan pasar yang besar untuk hasil produksinya.

Scitovsky menunjukkan tentang dua konsep dari ekonomi ekstern dan tentang manfaat yang akan diperoleh sesuatu industri dari dua macam ekonomi ekstern yang terdapat dalam perekonomian. Mengenai hal yang pertama, ia membedakan ekonomi ekstern kepada (i) seperti yang terdapat dalam teori keseimbangan (*equilibrium theory*) dan (ii) seperti yang terdapat dalam teori pembangunan.

Dalam teori keseimbangan atau dalam teori konvensional, ekonomi ekstern diartikan sebagai perbaikan efisiensi yang terjadi dalam suatu industri sebagai akibat dari perbaikan teknologi yang diciptakan pada industri lain. Oleh Scitovsky ekonomi ekstern seperti ini dinamakan sebagai ekonomi ekstern teknologis (*technological external economies*).

Di samping itu hubungan interdependensi di antara berbagai industri dapat pula menciptakan ekonomi ekstern keuangan (*pecuniary external economies*), yaitu kenaikan keuntungan yang diperoleh suatu sektor yang bersumber dari tindakan-tindakan sektor lain. Dengan perkataan lain, keuntungan yang tercipta dalam suatu sektor bukan saja tergantung kepada efisiensi dari penggunaan faktor-faktor produksi dan tingkat produksi dalam sektor tersebut. Ia tergantung juga kepada penggunaan faktor-faktor produksi dan

tingkat produksi pada sektor-sektor lain, terutama sektor yang erat hubungannya dengan sektor yang pertama di sebutkan tadi.

Lewis menyatakan pentingnya usaha pembangunan antara sektor industri dengan sektor pertanian. Misalkan pertumbuhan sektor pertanian akan mengakibatkan tiga dampak yaitu : (1) terdapat kelebihan produksi di sektor pertanian yang dapat di jual ke sektor-sektor lain, (2) Jika produksi tidak bertambah berarti tenaga kerja yang digunakan bertambah dan (3) gabungan dari kedua keadaan itu. Apabila pertumbuhan ekonomi hanya dipusatkan kepada mengadakan industrialisasi dan mengabaikan pertanian maka proses pembangunan akan terhambat (Todaro, 1998).

Singer mengkritik pandangan yang menekankan tentang perlunya menciptakan pembangunan yang serentak di berbagai sektor. Menurut teori tersebut mengabaikan implikasi yang ditimbulkan oleh struktur kegiatan ekonomi terhadap pelaksanaan program pertumbuhan seimbang di sektor industri. Kalau pertumbuhan seimbang harus dilaksanakan, diragukan kemampuan negara-negara berkembang untuk menyediakan sumber-sumber daya untuk melaksanakan program tersebut. Hirschman juga meragukan kemampuan negara berkembang, karena kurangnya tenaga usahawan dan tenaga ahli, yang dalam waktu bersamaan membangun berbagai sektor, sehingga masing-masing mempunyai pasar yang luas untuk produksinya.

Pertumbuhan seimbang merupakan suatu varian dari teori mengenai masalah depresi di negara-negara maju, yaitu dalam perekonomian yang menghadapi masalah *underemployment*

equilibrium. Menghadapi masalah ini penanaman modal dilakukan tidak cukup dilakukan dalam satu sektor, karena kenaikan permintaan yang diakibatkan oleh kenaikan pengeluaran tersebut, serta pengeluaran yang timbul sebagai akibat proses multiplier tidak cukup besar untuk menyerap produksi yang diciptakan oleh penanaman modal tersebut.

Selanjutnya dalam pembangunan akan lebih maksimum jika dilakukan dalam sektor yang produktif. Dalam sektor produktif mekanisme perangsang pembangunan atau *inducement mechanisme* yang tercipta sebagai akibat dari terdapatnya hubungan di antara berbagai industri. Kaitan antara industri penyedia dan pengguna bahan baku digolongkan *backward linkage effect* dan *forward linkage effect*. Dengan demikian pembangunan akan lebih sesuai jika dilakukan dengan pola pertumbuhan tidak seimbang.

2.4 Perubahan Struktur Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam masa orde yang lalu ternyata telah mengubah struktur perekonomian Indonesia. Ekonomi di negara manapun umumnya akan mengalami pertumbuhan (*growth*) baik karena trend alamiah maupun akibat kebijaksanaan ekonomi. Adanya pertumbuhan tersebut lazimnya diukur atau dikalkulasi dengan komponen pendapatan nasional bruto (PNB) dan pendapatan domestik bruto (PDB) yang dianggap sebagai indikator kesejahteraan masyarakat secara umum.

Perkembangan yang terjadi antara lain perubahan struktur ekonomi, perubahan teknologi dan perubahan kelembagaan baik dalam produksi maupun aspek-aspek lainnya. Perubahan struktur

ekonomi juga terjadi dalam bentuk perubahan pangsa (*share*) relatif dari sektor-sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan, sektor sekunder yaitu industri pengolahan dan sektor tertier yaitu sektor jasa-jasa dalam pendapatan domestik regional bruto (*PDRB*), kesempatan kerja dan sektor impor-ekspor (Anwar, 1996).

Sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh "Chenery dan Sirquin", yang mengatakan bahwa pada awal terjadinya suatu pembangunan ekonomi, pangsa sektor pertanian akan terlihat sangat menonjol, kemudian sejalan dengan semakin tingginya pendapatan nasional di negara tersebut lambat laun sektor pertanian akan semakin menurun sedangkan pangsa untuk sektor industri dan jasa-jasa akan meningkat (Arsyad, 1992).

Perluasan ekonomi di sektor industri sebagian merupakan hasil reinvestasi dari surplus, memerlukan tambahan tenaga kerja, mengingat tingkat upah di sektor pertanian lebih rendah, tambahan tenaga kerja untuk sektor industri akan semakin tinggi. Dengan kata lain bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menarik tenaga kerja yang dahulunya berada pada sektor pertanian masuk dalam dunia industri.

Menurut Sukirno (1985) perubahan struktur ekonomi atau transformasi struktural ditandai dengan beberapa ciri, yaitu:

- (a) Pertumbuhan ekonomi lebih besar bila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk.
- (b) Pangsa dari sektor primer akan menurun.
- (c) Pangsa sektor sekunder meningkat, share sektor tertier relatif konstan.

- (d) Konsumsi kebutuhan pokok menurun, hal dikenal sebagai Hukum Engel (*Engel's Law*). Implikasinya adalah sisi produksi, peran sektor primer berkurang dan di sisi permintaan peran faktor konsumsi berkurang, sedang sektor industri dan investasi meningkat.

Kuznets (1960) mendefinisikan perubahan struktural sebagai perubahan dalam komposisi permintaan, perdagangan, produksi dan penggunaan faktor produksi yang diperlukan guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem ekuilibrium umum, ciri dan pengaturan waktu dari proses industrialisasi dipengaruhi oleh perubahan permintaan domestik, pergeseran keunggulan komparatif, pertumbuhan produktivitas sektoral dan akumulasi barang modal.

Perubahan struktural atau transformasi perekonomian suatu negara atau suatu wilayah adalah perubahan dari sistem ekonomi tradisional ke sistem modern, atau perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri. Kemudian dari sektor industri ke sektor jasa-jasa. Perubahan ini melibatkan seluruh fungsi ekonomi termasuk perubahan produksi dan perubahan dalam komposisi permintaan, konsumsi, perdagangan internasional dan sumber daya serta perubahan faktor-faktor sosial ekonomi seperti urbanisasi atau pertumbuhan dan distribusi penduduk.

Dalam konteks perubahan struktural terdapat satu tahap yang dikenal dengan era tinggal landas. Dalam era tinggal landas perubahan struktural terjadi secara otomatis dengan pertumbuhan ekonomi berjalan secara berkelanjutan (*sustainable*). Tercapainya tahap tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri:

- (a) Tingkat investasi produktif mencapai paling sedikit 10% dari pendapatan nasional.
- (b) Terdapat satu atau dua sektor andalan yang menjadi tulang punggung perekonomian.
- (c) Terciptanya kegiatan politik, sosial, dan kelembagaan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perubahan struktural atau transformasi struktur ekonomi suatu negara, suatu wilayah atau suatu daerah tentu saja akan tergantung pada berbagai faktor yang harus dipenuhi. Hal tersebut meliputi sumber daya alam yang akan menyediakan lapangan, bahan baku dan fasilitas pendukung terjadinya perubahan tersebut serta sumber daya manusia. Apabila faktor-faktor tersebut dapat dipenuhi maka tentu saja proses perubahan akan berlangsung dengan baik.

2.5 Pengembangan Potensi Ekonomi

Sehubungan dengan berbagai hal yang terkait dalam pengembangan potensi ekonomi, ada beberapa komponen penting yang perlu dianalisis, yakni :

(a) Akumulasi Modal

Akumulasi modal meliputi semua investasi baru pada tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan masyarakat diinvestasikan dengan tujuan untuk memperbesar output, pabrik baru, mesin, peralatan dan material. Akumulasi modal tentunya harus didasarkan pada kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki dan akumulasi

sumber daya alam berupa bahan mentah (*raw material*) yang akan dikelola.

Dengan meningkatkan stok modal secara fisik suatu negara akan memungkinkan tercapainya peningkatan output yang optimal. Investasi produktif ini pada umumnya juga harus dilengkapi dengan infrastruktur sosial ekonomi yaitu : jalan, listrik, air, komunikasi dan sebagainya. Keseluruhan infrastruktur ini diberdayakan guna menunjang aktivitas perekonomian secara terpadu.

(b) Pertumbuhan penduduk dan jumlah angkatan kerja.

Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja, secara tradisional dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar akan meningkatkan luasnya pasar domestik.

Masalah pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja ini tentu saja tidak akan lepas dari aspek sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan yang besar hendaknya diikuti pula oleh kemampuan sumber daya tersebut dalam mengakses berbagai perkembangan dan perubahan yang perlu dikuasai untuk memungkinkan terserapnya tenaga kerja untuk mengelola sumber daya yang harus dikelola. Dengan kata lain bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan tingkat kemampuan yang tinggi merupakan unsur penting dalam memungkinkan terciptanya pertumbuhan ekonomi.

(c) Kemampuan Teknologi

Kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan cara penyelesaian tradisional. Kemampuan teknologi yang netral terjadi apabila penggunaan teknologi berhasil mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan sumber dan faktor input yang sama. Dengan demikian perkembangan dalam bidang teknologi bila diimbangi dengan perkembangan sumber daya manusianya untuk menyerap teknologi tersebut akan mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan ekonomi. Sukirno (1985) menyatakan bahwa suatu perekonomian dikatakan akan menjalani pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonominya adalah lebih tinggi pada masa sekarang daripada yang dicapai pada masa sebelumnya.

Salah satu teori yang membahas tentang pengembangan potensi wilayah adalah teori pusat pertumbuhan (*Growth Pole Theory*). Teori ini merupakan salah satu teori yang dikembangkan dengan menggabungkan prinsip-prinsip konsentrasi dengan desentralisasi secara sekaligus (Alconse, 1986). Teori ini merupakan salah satu alat untuk mencapai pembangunan wilayah yang saling bertolak belakang, yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok wilayah. Juga dengan menggabungkan kebijaksanaan dan program pembangunan wilayah dan perkotaan secara terpadu.

Perroux (1955) pertama kali mengembangkan teori ini. Menurutnya suatu proses pengembangan didefinisikan sebagai suatu konsentrasi industri pada suatu tempat tertentu yang



kesemuanya saling terkait melalui hubungan antar input dan output dengan industri utama (*progressive industri*). Konsentrasi dan saling berkaitan merupakan dua faktor penting dalam setiap pusat pengembangan karena melalui faktor-faktor ini akan dapat diciptakan berbagai bentuk aglomerasi ekonomi yang dapat menunjang pertumbuhan industri-indusrti yang bersangkutan melalui penurunan ongkos produksi.

Keuntungan aglomerasi yang merupakan kekuatan utama bagi setiap pusat pengembangan dibagi 3, yakni:

- (a) *Scale economics*, yaitu semacam keuntungan yang dapat timbul karena pusat pengembangan memungkinkan perusahaan investasi yang tergabung di dalamnya beroperasi dengan skala besar, karena adanya jaminan sumber bahan baku dan pasar.
- (b) *Localization economics*, yakni timbul karena adanya saling keterkaitan antar industri, sehingga kebutuhan bahan baku dan pemasaran dapat dipenuhi dengan mengeluarkan ongkos angkut yang minimum.
- (c) *Urbanization economics*, yang timbul karena fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi dapat dipergunakan bersama sehingga pembebanan ongkos untuk masing-masing perusahaan dapat dilakukan seminim mungkin.

Bila kegiatan ekonomi (industri) yang saling berkaitan dikonsentrasi pada suatu tempat maka pertumbuhannya dapat ditingkatkan lebih cepat dibandingkan bila terpencah ke seluruh pelosok wilayah. Hal ini dikarenakan oleh berbagai hal, seperti jarak tempuh yang singkat sehingga memungkinkan biaya yang minim, jumlah tenaga kerja yang mudah diperoleh serta bahan baku yang

dapat diperoleh dalam jumlah besar dan lebih murah (Richardson, 1991).

Konsep pusat pengembangan sebagai alat perumus kebijaksanaan tidak saja dilakukan pada tingkat wilayah tetapi juga pada tingkat nasional. Dalam hal ini seringkali terjadi pertentangan antara kepentingan wilayah dan nasional, terutama dalam penentuan lokasi dan anggota, dapat menimbulkan kepincangan pembangunan yang semakin tinggi (Esmara, 1986).

Dalam perkembangan ekonomi wilayah "Hoover dan Fisher" mengemukakan tahapan-tahapan dalam pembangunan ekonomi wilayah yakni :

- (a) Subsistensi ekonomi, dalam hal ini dikatakan bahwa pembangunan ekonomi wilayah akan sama halnya dengan pembangunan nasional, di mana pembangunan tersebut akan berjalan secara berkesinambungan dan subsisten.
- (b) Pengembangan transportasi dan spesialisasi lokal, dalam hal ini dimaksudkan bahwa dalam tahapan pembangunannya suatu pembangunan wilayah hendaknya memusatkan diri pada potensi-potensi yang dimilikinya dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif dan kompetitif, untuk mampu bersaing dengan wilayah lain.
- (c) Perdagangan antar wilayah, dalam hal ini dimungkinkan dengan besarnya output wilayah tersebut serta kemampuannya untuk bersaing dengan wilayah lain.
- (d) Industrialisasi, pada tahap ini pembangunan wilayah sudah memasuki tahap dunia industri. Dengan demikian maka sektor

primer sudah mulai ditinggalkan dan terjadinya perubahan struktur.

- (e) Spesialisasi wilayah, dalam tahap ini pembangunan wilayah berusaha menetapkan spesialisasi dengan mempertimbangkan potensi utama yang terdapat di wilayahnya.
- (f) Aliran faktor produksi antar wilayah. Dalam tahap ini suatu wilayah tidak hanya mengandalkan faktor produksi yang ada di wilayahnya. Kekurangan akan faktor produksi dapat dialirkan dari wilayah lain dan demikian pula sebaliknya.

BAB III

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI WILAYAH PANTAI BARAT DAN PANTAI TIMUR SUMATERA UTARA

3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Bagian ini akan menguraikan pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk di kedua wilayah tersebut dan Sumatera Utara mulai tahun 1987 hingga tahun 1999. Kalau melihat Tabel 1, ternyata tahun 1987 di wilayah pantai Barat kabupaten Nias masih sangat jauh ketinggalan dibandingkan dengan daerah lain. Kota Sibolga pada tahun yang sama pendapatan perkapita penduduknya mencapai Rp. 1.184.308 sedangkan Nias hanya Rp.770.400. Ketinggalan ini banyak disebabkan berbagai kegiatan pembangunan belum menyentuh daerah tersebut sedangkan Sibolga sejak lama telah menjadi kota pelabuhan yang banyak memiliki hubungan perniagaan dengan daerah lain.

Perkembangan yang terjadi akibat adanya pembangunan yang mendorong peningkatan pendapatan perkapita di tiap daerah. Hingga tahun 1997, pendapatan perkapita penduduk di wilayah pantai barat Sumatera Utara mencapai Rp. 1.445.019 namun masih di bawah rata-rata pendapatan per kapita propinsi, dan hal ini berlaku di setiap kabupaten kecuali kota Sibolga. Dengan demikian perkembangan pendapatan perkapita yang terjadi belum mampu mengangkat kabupaten yang ada ke tingkat yang lebih tinggi daripada propinsi.

Tabel 1 : PDRB Per Kapita Wilayah Pantai Barat Dan Sumatera Utara Tahun 1987 Sampai Tahun 1999 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (Rupiah)

Tahun	Nias	Mandailing Natal	Tapanuli Selatan	Tapanuli Tengah	Sibolga	Pantai Barat	Sumatera Utara
1987	770.399,97	-	897.579,37	881.058,48	1.184.308,08	865.357,68	1.073.517,12
1988	828.948,87	-	1.040.565,09	970.396,85	1.221.389,88	969.459,32	1.178.002,20
1989	883.678,50	-	1.076.902,44	1.057.753,61	1.332.372,73	1.022.480,12	1.267.606,41
1990	879.622,70	-	1.138.190,34	1.152.603,00	1.449.432,93	1.068.825,61	1.345.450,78
1991	914.380,59	-	1.242.385,36	1.242.010,96	1.575.034,32	1.149.779,77	1.418.455,71
1992	924.123,78	-	1.289.852,37	1.279.450,42	1.727.347,00	1.187.936,21	1.505.480,79
1993	956.599,06	-	1.331.280,62	1.340.987,02	1.878.908,38	1.233.049,58	1.663.921,63
1994	1.077.685,19	-	1.482.126,57	1.461.965,17	2.075.629,66	1.372.348,96	1.807.646,76
1995	1.179.174,79	-	1.638.508,76	1.587.902,72	2.448.823,04	1.515.507,39	1.935.354,31
1996	1.244.218,17	-	1.742.531,88	1.721.738,48	2.891.802,37	1.622.875,69	2.085.762,11
1997	1.282.689,46	1.525.885,48	1.849.191,19	1.793.655,42	2.936.676,56	1.445.018,62	2.196.887,83
1998	1.185.112,80	1.414.563,94	1.714.873,92	1.600.255,90	2.666.535,57	1.330.694,04	1.916.326,09
1999	1.187.186,13	1.491.613,34	1.689.118,36	1.600.913,38	2.755.161,11	1.336.156,60	1.929.262,21

Sumber : Pendapatan Regional (PDRB) Propinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota 1993 - 1999
Pendapatan Regional (PDRB) Propinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota 1983 - 1993

Secara umum pendapatan perkapita penduduk di wilayah pantai Timur lebih tinggi pendapatannya dibandingkan propinsi. Tanjung Balai merupakan kota yang paling tinggi pendapatan perkapitanya di wilayah ini, pada tahun 1987 mencapai Rp. 2.044.307 dan meningkat menjadi Rp. 3.226.338 di tahun 1997 kemudian turun di tahun 1998 dan 1999 sejalan dengan krisis perekonomian yang terjadi. Deli Serdang selama periode 1987 hingga 1999 tetap merupakan kabupaten yang paling rendah pendapatan perkapitanya di wilayah ini, di mana tahun 1999 hanya sebesar Rp. 1.517.309. Keadaan ini dapat dilihat melalui Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 2 : PDRB Per Kapita Wilayah Pantai Timur Tahun 1987 Sampai Tahun 1999 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 (Rupiah)

Tahun	Labuhan Batu	Asahan	Deli Serdang	Langkat	Tanjung Balai	Medan	Pantai Timur
1987	1.262.008,91	1.321.788,50	721.966,00	1.070.919,70	2.044.306,68	1.612.393,87	1.194.500,93
1988	1.392.476,77	1.571.477,36	797.243,90	1.159.434,93	1.730.415,29	1.737.608,44	1.323.753,32
1999	1.533.710,13	1.658.406,69	873.120,33	1.244.431,72	1.899.818,92	1.925.236,79	1.448.327,58
1990	1.582.345,56	1.781.479,66	888.073,25	1.242.132,53	1.792.173,10	2.038.471,15	1.494.686,81
1991	1.683.809,25	1.877.954,40	908.533,34	1.255.281,68	1.968.895,64	2.131.601,83	1.553.817,20
1992	1.734.526,79	1.936.274,19	969.153,46	1.320.129,29	2.184.494,31	2.319.346,15	1.654.494,63
1993	1.878.813,33	2.100.000,05	1.164.793,12	1.461.841,27	2.361.721,91	2.378.685,04	1.814.458,56
1994	2.020.341,44	2.272.748,23	1.317.597,81	1.568.155,24	2.579.465,31	2.517.515,37	1.958.982,26
1995	2.177.092,24	2.487.424,94	1.501.430,68	1.708.396,20	2.812.167,54	2.654.359,93	2.124.377,92
1996	2.391.211,82	2.723.002,10	1.572.173,45	1.863.162,55	3.010.839,36	2.868.489,67	2.293.326,89
1997	2.569.248,89	2.943.298,44	1.688.256,05	1.934.030,36	3.226.337,92	3.036.561,30	2.442.930,73
1998	2.522.008,14	2.935.412,34	1.486.733,45	1.910.882,73	2.976.178,60	2.427.367,79	2.188.195,51
1999	2.568.917,49	3.052.778,84	1.517.309,22	1.911.540,04	3.036.308,59	2.460.172,60	2.230.310,10

Sumber : Pendapatan Regional (PDRB) Propinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota 1993 - 1999
Pendapatan Regional (PDRB) Propinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota 1983 - 1993

3.2 Perkembangan Ekonomi

Melalui pendapatan perkapita suatu daerah dapat diketahui perkembangan ekonomi daerah tersebut. Typologi Klassen dapat menggambarkan perkembangan tersebut dengan kwadran-kwadran perkembangan. Typologi suatu daerah di bagi menjadi 4 tipe, yaitu :

- a. kwadran I = *developed region* (daerah maju)
- b. kwadran II = *developing region* (daerah sedang berkembang)
- c. kwadran III = *underdeveloped region* (daerah terkebelakang)
- d. kwadran IV = *stagnant region* (daerah stagnan).

Mengetahui pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan perkapita suatu daerah. Perhitungan pertumbuhan melalui persamaan semi logaritma, $\ln I = a + r T$, di mana r adalah pertumbuhan rata-rata per tahunnya. Momentum perkembangan dipisah menjadi dua bagian yang sama periodenya, yaitu tahun 1975 sampai 1987 dan tahun 1987 sampai 1999, kecuali kabupaten Mandailing Natal hanya dianalisis tahun 1997 sampai tahun 1999. Hasil analisis dari daur perkembangan ekonomi di wilayah pantai Barat dan pantai Timur Sumatera Utara disajikan pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3 : Typologi Perkembangan Ekonomi Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara Tahun 1975 - 1987 dan Tahun 1987 - 1999

Uraian	Nias	Mandailing Natal	Tapanuli Selatan	Tapanuli Tengah	Sibolga	Pantai Barat
r ('75-87)	1,9025	-	5,1867	3,0876	1,6113	3,6531
$r_j - r$	- 3,2536	-	0,0307	- 2,0685	- 3,5448	- 1,5029
I_j/I '87	0,7176	-	0,8361	0,8207	1,1032	0,8061
Kwadrant	III	-	II	III	IV	III
r ('87-99)	4,1620	- 1,1358	5,7276	5,5085	8,3899	4,1336
$r_j - r$	- 1,4805	- 6,7783	0,0851	- 0,1340	2,7474	- 1,5089
I_j/I '99	0,6154	0,7732	0,8755	0,8298	1,4281	0,6926
Kwadrant	III	III	II	III	I	III

Sumber : Analisis Data BPS, 2001

Keterangan :

- r ('75 - 87) = pertumbuhan ekonomi tahun 1975 - 1987
- r ('87 - 99) = pertumbuhan ekonomi tahun 1987 - 1999
- $r_j - r$ = pertumbuhan daerah - pertumbuhan Sumatera Utara
- I_i/I = perbandingan pendapatan perkapita daerah dengan perkapita Sumatera Utara

Kabupaten Nias pada momentum pertama berada pada *under developed region* bersama dengan kabupaten Tapanuli Tengah yaitu daerah yang pertumbuhannya lebih lambat dan pendapatan perkapitanya lebih rendah dibandingkan dengan Sumatera Utara. Kondisi menunjukkan walaupun kedua kabupaten ini memiliki potensi daerah yang besar, tanpa tersedianya sumberdaya di daerah tersebut kurang memberikan perkembangan yang berarti dibandingkan perkembangan yang terjadi di Sumatera Utara secara umum. Pembangunan yang dilaksanakan pada momentum kedua tidak menunjukkan perubahan yang berarti terhadap kedua kabupaten tersebut, demikian pula halnya dengan Kabupaten Mandailing Natal. Analisis terhadap Mandailing Natal dilakukan pada saat krisis ekonomi sedang berlangsung sehingga pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan pada periode 1997 sampai 1999. Dengan demikian kabupaten ini kurang memenuhi kriteria yang dibuat.

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan daerah yang sedang dalam membangun. Posisi kabupaten ini pada periode ini digolongkan sebagai *developing region* yaitu daerah yang pertumbuhannya lebih tinggi dibanding propinsi tetapi pendapatan perkapitanya lebih kecil dibandingkan propinsi. Keadaan ini berlangsung dari momentum pertama hingga momentum kedua namun sedikit mengalami perbaikan yaitu semakin mendekati pendapatan perkapita propinsi.

Secara umum perkembangan ekonomi daerah-daerah di wilayah pantai Barat masih tergolong terkebelakang. Kecuali Kota Sibolga yang pada momentum pertama berada dalam keadaan

stagnan karena pendapatan perkapita penduduknya masih lebih besar dibandingkan dengan pendapatan perkapita propinsi tetapi laju pertumbuhannya lebih lambat dibanding Sumatera Utara. Dengan berjalannya waktu, pembangunan di daerah ini terus dilaksanakan hingga akhirnya pada momentum kedua kota ini tergolong daerah yang maju dengan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding Sumatera Utara.

Tabel 4 : Typologi Perkembangan Ekonomi Wilayah Pantai Timur Sumatera Utara Tahun 1975 - 1987 dan Tahun 1987 - 1999

Uraian	Labuhan Batu	Asahan	Deli Serdang	Langkat	Tanjung Balai	Medan	Pantai Timur
r ('75-87)	3,9789	7,5603	6,2509	4,2397	5,2824	3,8479	5,1734
$r_j - r$	- 1,1771	2,4042	1,0949	- 0,9164	0,1264	- 1,3082	0,0174
I_j/I '87	1,1756	1,2313	0,6725	0,9976	1,9043	1,5020	1,1127
Kwadrant	IV	I	II	III	I	IV	I
r ('87-99)	6,1557	6,8332	7,2720	5,3534	5,2960	4,1619	5,7304
$r_j - r$	0,5132	1,1907	1,6295	- 0,2891	- 0,3465	- 1,4806	0,0879
I_j/I '99	1,3316	1,5824	0,7865	0,9908	1,5738	1,2752	1,1560
Kwadrant	I	I	II	III	IV	IV	I

Sumber : Analisis Data BPS, 2001

Kabupaten Langkat sebagai satu-satunya kabupaten yang memiliki sumber pendapatan dari minyak bumi merupakan daerah yang paling terkebelakang perkembangan ekonominya di wilayah pantai Timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri perminyakan yang ada di daerah ini kurang memberikan efek ganda bagi perekonomian masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi tidak mengalami perubahan yang berarti dan pendapatan perkapita penduduknya relatif rendah. Jika sektor migas disertakan maka

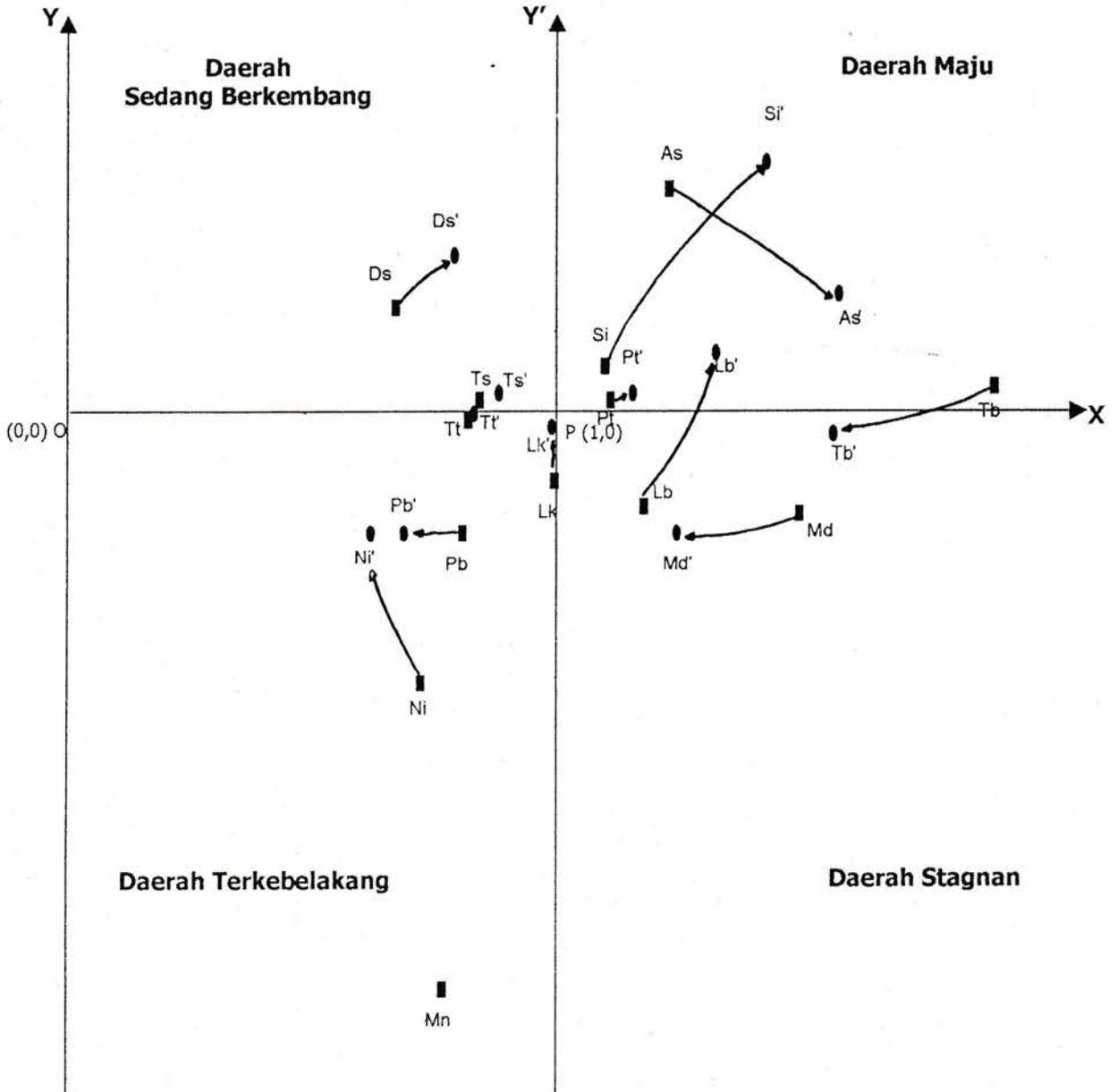
kabupaten langkat digolongkan daerah yang stagnan karena pendapatan perkapitanya lebih tinggi dibanding propinsi namun pertumbuhannya relatif lambat. Dengan demikian langkat cenderung kurang berkembang dengan pertumbuhan yang lambat, baik dengan migas ataupun tanpa migas.

Deli Serdang dengan wilayah terluas mengalami pertumbuhan yang cepat pada momentum pertama dan kedua namun pendapatan perkapita penduduknya masih di bawah propinsi. Asahan mengalami pertumbuhan yang tinggi dan pendapatan perkapita penduduknya relatif besar sehingga pada momentum pertama digolongkan daerah yang maju sama halnya dengan Tanjung Balai.

Pendapatan perkapita yang tinggi tetapi pertumbuhannya relatif lambat dialami oleh Kota Medan dan Kabupaten Labuhan Batu. Namun pada momentum kedua Labuhan Batu mengalami pertumbuhan yang relatif cepat seiring dengan semakin luasnya lahan perkebunan yang menghasilkan dan memberikan efek ganda bagi perekonomian daerah tersebut. Sedangkan Medan dan Tanjung Balai pada momentum kedua mengalami pertumbuhan yang lambat dan cenderung stagnan. Keadaan ini terjadi karena sumberdaya yang ada selama ini telah terpakai tetapi kurang efisien sehingga cukup sulit mempercepat pertumbuhannya.

Secara rata-rata, perkembangan ekonomi di wilayah pantai Timur Sumatera Utara relatif maju. Pada momentum pertama dan kedua posisi wilayah ini digolongkan sebagai *developed region*. Daur perkembangan daerah-daerah di pantai Barat dan Timur Sumatera Utara dapat dilihat dari Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1 : Typologi Perkembangan Ekonomi



Keterangan :

- Pt = Wilayah pantai Timur
- Pb = Wilayah pantai Barat
- Ni = Nias
- Mn = Mandailing Natal
- Ts = Tapanuli Selatan
- Tt = Tapanuli Tengah
- Si = Sibolga
- Lb = Labuhan Batu

- As = Asahan
- Ds = Deli Serdang
- Lk = Langkat
- Tb = Tanjung Balai
- Md = Medan
- = Momentum Awal (Tahun 1975 - 1987)
- = Momentum Akhir (Tahun 1987 - 1999)

BAB IV

POLA PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PANTAI BARAT DAN PANTAI TIMUR SUMATERA UTARA

Pola pertumbuhan seimbang perlu diperhatikan dalam pembangunan adalah untuk menjaga agar pembangunan tersebut tidak menghadapi hambatan dalam hal memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber energi (air, listrik dan gas), dan fasilitas-fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar. Selain itu menghindari hambatan memperoleh pasaran untuk barang-barang yang telah dan akan diproduksi. Dengan demikian yang dimaksud pertumbuhan seimbang adalah usaha pembangunan yang mengatur program penanaman modal secara sedemikian rupa, sehingga sepanjang proses pembangunan tidak akan timbul hambatan-hambatan yang bersumber dari permintaan maupun penawaran (Sukirno, 1985).

Hirschman mengatakan bahwa pada hakekatnya teori pertumbuhan seimbang merupakan suatu ulasan mengenai keadaan masa lalu secara perbandingan statis, yaitu membandingkan keadaan suatu perekonomian dalam dua masa yang berbeda. Melalui cara yang demikian memang akan ternyata bahwa pembangunan berlaku di berbagai aspek kegiatan dalam perekonomian (Sukirno, 1985).

Tetapi bila pengamatan dilakukan dengan cara melihat proses pembangunan yang terjadi di kedua masa tersebut, keadaan yang sangat berbeda akan dijumpai. Akan terlihat berbagai aspek kegiatan ekonomi mengalami perkembangan dengan laju yang

berbeda, yang berarti bahwa pembangunan berjalan secara tidak seimbang. Perkembangan *leading sector* akan menggalakkan perkembangan sektor lainnya, dengan begitu juga perkembangan di suatu sektor akan menggalakkan perkembangan sektor-sektor lain yang sangat erat hubungannya dengan sektor yang mengalami perkembangan.

Selanjutnya pertumbuhan tidak seimbang lebih sesuai untuk dilaksanakan di wilayah-wilayah terkebelakang karena wilayah-wilayah tersebut menghadapi masalah kekuarangan sumber daya. Dengan melaksanakan pola pertumbuhan tidak seimbang, usaha pembangunan pada waktu tertentu dipusatkan kepada beberapa kegiatan yang akan mendorong penanaman modal terpengaruh (*induced investment*) di berbagai kegiatan lain pada periode berikutnya. Dengan demikian pada setiap tingkat pertumbuhan sumber-sumber daya yang sangat langka dapat digunakan dengan lebih efisien.

Samuelson dan Sollow (Azis, 1994) mengembangkan suatu persamaan tentang koefisien variasi type Pearson yang membandingkan pertumbuhan sektoral dengan laju pertumbuhan keseluruhan selama waktu tertentu. Perhitungan koefisien variasi Pearson dihubungkan dengan pertumbuhan total wilayah memberikan hasil koefisien korelasi sebagai berikut :

Tabel 5 : Korelasi Pearson dan Spearman Antara Koefisien Variasi Sektoral Dengan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Daerah	Korelasi	
	Pearson (r)	Spearman (ρ)
Wilayah Pantai Barat	0,788	- 0,029
Wilayah Pantai Timur	0,444	- 0,200
Sumatera Utara	0,636	0,314

Sumber : Analisis Data BPS, 2001

Tabel 5 di atas memberikan makna bahwa pola pertumbuhan yang terjadi di wilayah pantai Barat adalah pola pertumbuhan yang tidak seimbang. Ini dapat dilihat dari ρ yang bernilai negatif dengan kekuatan korelasi pearson sebesar 0,788. Dengan demikian pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini di wilayah ini dititik-beratkan pada satu atau beberapa sektor yang utama.

Pertumbuhan yang tidak seimbang, menurut Hirschman sangat bermanfaat untuk menghadapi masalah pembangunan yang sangat terbatas (masalah *underdevelopment*). Daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya dan dana sehingga tidak sanggup melaksanakan pertumbuhan yang seimbang. Oleh karena itu suatu daerah untuk mampu melakukan pembangunan sangat ditentukan oleh kesanggupannya untuk melaksanakan pembentukan modal (*ability to invest*) (Sukirno, 1985).

Apabila ditelaah sebenarnya untuk daerah-daerah di wilayah pantai Barat lebih cocok melaksanakan pertumbuhan tidak seimbang, karena secara historis pembangunan ekonomi yang telah

berlaku coraknya tidak seimbang. Sektor tertentu yang dianggap *leading* mendapatkan perhatian yang serius untuk dikembangkan sehingga pertumbuhannya lebih cepat dan menjadi pendorong bagi pembangunan sektor lainnya. Selain itu dengan pertumbuhan tidak seimbang akan terjadi efisiensi penggunaan sumber-sumberdaya yang tersedia.

Konsentrasi pembangunan di wilayah pantai Timur sebagian besar pada sektor-sektor industri sehingga cenderung tidak seimbang pertumbuhannya dengan sektor-sektor yang lain. Keuntungan lokasi sektor merupakan suatu tanda dari ketidakseimbangan, dan besarnya keuntungan identik dengan suatu indeks kasar yang menunjukkan tingkat ketidakseimbangan yang terjadi.

Menurut pendapat Scitovsky dan Hirschman (Sukirno, 1985) keuntungan pada suatu sektor akan mendorong penanaman modal pada industri tersebut, dan selanjutnya penanaman modal yang dilakukan akan menghapuskan keuntungan. Dengan demikian penanaman modal akan menciptakan keadaan yang menjurus ke arah keseimbangan. Tetapi penanaman modal tersebut akan menciptakan keuntungan pada sektor lain, ketidakseimbangan berlaku dan keadaan ini mendorong penanaman di sektor tersebut.

Di wilayah pantai Barat dan wilayah pantai Timur Sumatera Utara terjadi pertumbuhan yang tidak seimbang. Gambaran tersebut menunjukkan suatu fenomena yang sesuai mengenai bagaimana proses pembangunan berlaku. Yaitu pembangunan yang terjadi merupakan suatu rangkaian ketidakseimbangan-ketidakseimbangan (*a chain of disequilibria*) pertumbuhan.

Tugas yang harus dilaksanakan oleh perencana pembangunan adalah merencanakan suatu strategi untuk menjamin agar ketidakseimbangan-ketidakseimbangan terus tercipta. Selanjutnya akan tercipta suatu keadaan di mana perekonomian daerah terus maju ke depan, pembangunan tetap menjamin terciptanya disproporsi dan ketidakseimbangan.

Pembangunan Sumatera Utara selain dilakukan di kedua wilayah tersebut, juga terjadi di wilayah lain. Sehingga pertumbuhan sektor-sektor yang lain disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah yang menyebabkan pertumbuhan propinsi mengikuti pola pertumbuhan seimbang. Pertumbuhan yang terjadi di suatu sektor dalam satu wilayah merupakan akibat penanaman modal yang dilakukan sehingga akan menciptakan *pecuniary external economies* bagi wilayah dan sektor yang lain.

Tumbuhnya suatu sektor dengan cepat menyebabkan eksternal ekonomis bagi sektor lain, karena sektor tersebut menggunakan bahan baku dari sektor lain, dan sektor tersebut akan menghasilkan bahan baku bagi sektor yang lain. Sektor yang menghasilkan barang komplementer untuk output sektor yang diunggulkan, karena dengan naiknya produksi sektor tersebut akan meningkatkan permintaan output sektor lain. Output sektor yang diunggulkan mendorong bertambahnya pendapatn orang-orang yang terlibat dengan sektor itu dan munculnya industri yang menghasilkan substitusi bahan baku sektor unggulan.

Agroindustri Sumatera Utara merupakan *leading* sektor yangn banyak mendapatkan perhatian. Di berbagai daerah yang pola

pertumbuhannya tidak seimbang mungkin mengembangkan sektor ini dengan lebih cepat. Namun di lingkup propinsi pertumbuhan yang terjadi di sektor agroindustri akan menciptakan eksternalitas ekonomi baik ke hulu maupun ke hilir. Bagi wilayah yang menggantungkan pertumbuhannya di sektor pertanian akan mengalami peningkatan permintaan output pertanian sebagai bahan baku agro industri. Demikian pula dengan wilayah yang mengalami pertumbuhan sektor jasa relatif cepat, output agroindustri mendorong permintaan akan jasa semakin besar. Sehingga akhirnya di lingkup Sumatera Utara pembangunan yang dilaksanakan mengikuti pola pertumbuhan seimbang.

BAB V

KESIMPULAN

Hasil kajian terhadap perkembangan dan polan pertumbuhan ekonomi wilayah pantai barat dan pantai timur Sumatera Utara memberikan beberapa kesimpulan :

1. Pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan per kapita Sumatera Utara. Hanya Kota Sibolga daerah di wilayah pantai barat yang pendapatan per kapitanya di atas pendapatan perkapita Sumatera Utara.
2. Di wilayah pantai timur, Kabupaten Deli Serdang dan Langkat pendapatan per kapitanya lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan per kapita Sumatera Utara. Kabupaten Labuhan Batu, Asahan, Kota Tanjung Balai dan Medan memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi daripada Sumatera Utara.
3. Kabupaten Mandailing Natal, Nias, Langkat dan Tapanuli Tengah tergolong sebagai daerah terkebelakang (*under developed region*). Kabupaten Deli Serdang dan Tapanuli Selatan tergolong sebagai daerah sedang berkembang (*developing region*). Kabupaten Asahan, Labuhan Batu dan Kota Sibolga tergolong sebagai daerah maju (*developed region*). Yang tergolong sebagai daerah stagnan (*stagnant region*) adalah Kota Medan dan Tanjung Balai.
4. Pola pertumbuhan ekonomi wilayah pantai barat dan pantai timur mengikuti pola pertumbuhan tidak seimbang (*unbalanced growth*). Secara keseluruhan Sumatera Utara mengikuti pola pertumbuhan seimbang (*balanced growth*).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ananta, Aris, 1993. *Ciri Demografis, Kualitas Penduduk, Dan Pembangunan Ekonomi*. Lembaga Demografi FE-UI, Jakarta.
- Anwar, Effendi, 1996. "Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan". *Prisma*, Jakarta.
- Arief, Sritua, 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, UI-Press, Jakarta.
- Arsyad, Lincolin, 1992. *Ekonomi Pembangunan*, STIE-YKPN, Yogyakarta.
- Azis, Iwan Jaya, 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya Di Indonesia*, LPFE-UI, Jakarta.
- Baran, P.A., 1980. *The Political Economic of Growth*. Stanford Press.
- Bendavid-Val, Avrom, 1991. *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners*, 4th Edition, Praeger Publisher, New York.
- Borne, A., 1979. *A Studies In Economic Development*. Stanford Press.
- Budiono, 1981. *Teori Pertumbuhan : Suatu Seri Sinopsis Ilmu Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.
- Dugary, Max, 1982. *The Urban and Rural Movement*. Prentice Hall.
- Esmara, Hendra, 1986. *Politik Perencanaan Pembangunan. Teori Kebijaksanaan Dan Praktek*. Gramedia, Jakarta.
- Glasson, John, 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*, LPFE-UI, Jakarta.
- Gujarati, Damodar, 1995. *Ekonometrika Dasar*, Erlangga, Jakarta.
- Hadjisuroso, 1994. "Konsep Dasar Pengembangan Wilayah Di Indonesia", dalam *Prisma* No. 8 Agustus, Jakarta.
- Hall, Hill, 1989. *Unity and Diversity Regional Economic Development: In Indonesia Since 1970*, Oxford University Press.
- Hanafiah. T, 1982. *Pendekatan Wilayah dan Pembangunan Pedesaan*, Fakultas Pertanian-IPB, Bogor.

- Heidemann, Claus, 1990. *Regional Planning Methodology*, Institut Für Regionalwissenschaft Der Universität Karlsruhe.
- Hicks, Ursula, 1967. *Learning About Economic Development*. Oxford Economic Paper.
- Irawan dan M. Suparmoko, 1992. *Ekonomika Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta.
- Issard, Walter, 1960. *Methods of Regional Analysis*, MIT Press.
- Jhingan, M.L., 1993. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Jhonson, H, Glenn, 1986. *Research Methodology for Economists :Philosophy and Practice*, MacMillan Publishing Company, London.
- Lewis, W. Arthur, 1980. *Dasar-dasar Perencanaan Ekonomi Negara*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- Madison, A., 1981. *Economic Progress and Policy In Development Contries*. Central Press.
- Nasution, Harmein, 1995. *Studi Pengembangan Modal Di Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara*, LP-USU, Medan.
- Nourse, Hugh O., 1968. *Regional Economics*, McGraw Hill.
- Richardson, Harry W., 1991. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*, Terjemahan Paul Sitohang, LPFE-UI, Jakarta.
- Salim, Emil, 1980. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*, Idayu, Jakarta.
- Sirojuzilam, 1994. *Analisis Potensi dan Perkembangan Mebidang Menuju Metropolitan Area*, FE-USU, Medan.
- Sukirno, Sadono, 1985. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, LPFE-UI Jakarta.
- Todayo, Micahel P., 1998. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Ke-3, Erlangga, Jakarta.